

FASILITASI PERUMUSAN SUARA ANAK UNTUK PENDIDIKAN LOMBOK TENGAH

Lalu Hamdian Affandi*¹, Sri Muliana Widiastuti², Annusapati³

¹Universitas Mataram

^{2,3}BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah

*e-mail: hamdian.fkip@unram.ac.id¹, smulianawidia@gmail.com², aan_03@yahoo.com³

Abstract

Democratic policy formulation needs data resources from first hand party. Children are the primary beneficiary of educational enterprises. Therefore, they need to be heard and involved in decision making processes. Current activity is an effort to explore and accommodate children's voices in terms of their right fulfilment. Current activity was conducted in 2 days by inviting children's representatives from each sub-district in Lombok Tengah. The activity was arranged by BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah. Methods of activity are lecturing and presentation, focus group discussion, and pleno. Current activity produces 18 points of children's voices which pertain to expectation for quality improvement of resources to support children's rights and communication strengthening between children and parents, society, and government as policy maker. Conclusion can be drawn from this activity is children need for time and space for expressing their aspirations with ethics ways yet targeted at the problems they perceive.

Keywords: children's voices, policy making

Abstrak

Perumusan kebijakan pendidikan yang demokratis membutuhkan sumber data yang akurat dari tangan pertama. Anak adalah penerima manfaat utama pendidikan. Oleh sebab itu, mereka perlu didengarkan dan dilibatkan dalam proses-proses pengambilan keputusan. Kegiatan ini merupakan upaya untuk mengeksplorasi dan mengakomodasi suara anak dalam kaitan dengan pemenuhan hak-hak mereka. Kegiatan ini dilakukan selama 2 hari dengan mengundang perwakilan anak dari setiap kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini diselenggarakan oleh BAPPERIDA Kabupaten Lombok Tengah. Metode pelaksanaan kegiatan adalah presentasi, diskusi kelompok terpusat, serta diskusi pleno. Kegiatan ini menghasilkan 18 poin rumusan suara anak yang berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya serta penguatan jaringan komunikasi antara anak dengan orang tua, masyarakat, serta pemerintah selaku pengambil kebijakan. Kesimpulan penting dari kegiatan ini adalah perlunya wadah yang melaluinya anak dapat menyalurkan aspirasi dengan cara yang santun namun sesuai dengan masalah.

Kata kunci: suara anak, perumusan kebijakan

1. PENDAHULUAN

Demokratisasi pendidikan merupakan bagian dari upaya perbaikan kualitas pendidikan dengan memberikan ruang pengambilan keputusan yang lebih besar bagi aktor lokal. Dalam praktiknya, demokratisasi pendidikan di Indonesia mengambil bentuk desentralisasi, yaitu penyerahan tanggung jawab pengelolaan sistem pendidikan kepada pemerintah daerah. Desentralisasi membawa misi pengambilan keputusan oleh pihak-pihak yang paling dekat dengan dinamika permasalahan pendidikan.

Salah satu aktor kunci sekaligus penerima manfaat utama pendidikan adalah siswa. Dalam penyelenggaraan pendidikan, siswa lah yang merasakan secara langsung berbagai perubahan kebijakan pemerintah. Segala bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam bidang pendidikan selalu bermuara pada pengalaman belajar yang dirasakan oleh siswa. Oleh sebab itu, pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan-keputusan pendidikan menjadi hal yang perlu mendapatkan perhatian.

Pengambilan keputusan yang ideal membutuhkan data sebagai dasarnya. Pilihan jenis dan sumber data yang digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan tentunya menjadi penentu kualitas keputusan. Siswa sebagai pihak yang paling terdampak dengan keputusan pendidikan,

tentunya bisa menjadi sumber data potensial yang penting. Para peneliti menunjukkan bahwa suara siswa telah banyak dikaji dalam kaitannya dengan isu perundungan, kebijakan sekolah, dan keterlibatan siswa (Geurts, Reijs, Leenders, Jansen, & Hoebe, 2024; Sandoval & Messiou, 2022). Walaupun demikian, cakupan isu yang dikaji melalui penelitian tentang suara anak tidak berkaitan langsung dengan kurikulum dan pembelajaran.

Studi tentang urgensi suara siswa dalam pengambilan keputusan memberikan justifikasi betapa pentingnya mendengarkan siswa sebelum kebijakan pendidikan dirumuskan (Flores & Ahn, 2024). Pentingnya akomodasi suara anak dalam pengambilan kebijakan diyakini berdampak positif terhadap kualitas kebijakan dan perkembangan anak. Dalam kaitan dengan pengambilan kebijakan, dampak pelibatan siswa adalah terakomodasinya kebutuhan siswa akan fasilitas belajar yang memadai (Rakhshanda, Kazi, Shabana, & Uzma, 2020) serta memudahkan guru melakukan adaptasi yang dibutuhkan siswa (Christidou, 2011). Bagi siswa, keterlibatan dalam rangkaian perumusan kebijakan berdampak terhadap peningkatan kepercayaan diri (Geurts et al., 2024), peningkatan kepedulian terhadap sekolah (Conner, Posner, & Nsoowa, 2022). Pada akhirnya, pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan dilaporkan berkaitan dengan peningkatan hasil belajar dan pengurangan angka bolos sekolah (Kahne, Bowyer, Marshall, & Hodgins, 2022). Dalam jangka panjang, pelibatan siswa dalam pengambilan keputusan adalah cara yang bisa digunakan untuk membangun keterikatan siswa terhadap sekolah, bahkan ketika mereka telah tamat sekolah dalam waktu yang lama.

Dalam kenyataannya, akomodasi suara siswa seringkali tidak teraktualisasi dalam proses pengambilan keputusan. Dalam banyak kasus, keputusan pendidikan lebih banyak dilakukan oleh pemerintah, kepala sekolah, guru, dan pemangku kepentingan lainnya tanpa melibatkan siswa. Kesenjangan tersebut muncul akibat asumsi guru tentang kemampuan siswa dan ketidakmampuan guru untuk berkolaborasi dengan anak (Geurts et al., 2024). Selain itu, kurangnya akomodasi suara siswa dalam upaya perbaikan sekolah bersumber dari keterbatasan struktur sekolah, keterbatasan waktu, dan keraguan terhadap kemampuan siswa (Jones & Bubb, 2021). Hambatan terhadap eksplorasi dan akomodasi suara anak, dengan demikian, bersumber dari kompetensi guru serta struktur dan budaya sekolah.

Sejumlah pakar menawarkan kerangka dasar yang dibutuhkan untuk mengoptimalkan eksplorasi dan akomodasi suara anak dalam pengambilan keputusan. Kerangka dasar tersebut mempostulatkan pentingnya beberapa prakondisi, yaitu relasi kuasa (*power relation*) antara guru dengan siswa, komitmen pada keaslian (*authenticity*) suara siswa, dan prinsip inklusifisme (Rudduck & Fielding, 2006). Seringkali terjadi, relasi kuasa yang menempatkan siswa sebagai pihak yang harus patuh pada guru dan otoritas lainnya menyebabkan aspirasi kebutuhan siswa tidak terdengar. Kondisi ini diperburuk oleh ketiadaan komitmen pada suara siswa dalam bentuk ketidakpercayaan pada kemampuan siswa untuk bersuara atau pelibatan perwakilan siswa yang tidak aspiratif.

Untuk mengeksplorasi dan mengakomodasi suara siswa, dibutuhkan kepekaan dan kesadaran akan pentingnya kehadiran siswa dalam pengambilan keputusan. Kehadiran siswa yang dimaksud adalah tereksplorasinya aspirasi siswa berdasarkan kebutuhannya melalui mekanisme dialog yang egaliter dan inklusif. Dialog yang egaliter menghendaki agar relasi kuasa menempatkan siswa dan otoritas pengambil keputusan dalam posisi kemitraan yang penuh keseimbangan. Selain itu, eksplorasi suara siswa perlu didasarkan pada prinsip inklusifitas yang tidak hanya mengakomodasi suara dari sekelompok siswa tertentu -melainkan, mendengarkan seluruh suara siswa dari semua kelompok.

Kegiatan ini adalah kegiatan eksplorasi suara siswa untuk perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini bertujuan menghimpun aspirasi siswa tentang perbaikan kualitas pendidikan. Pokok-pokok suara siswa tersebut kemudian dirumuskan dalam bentuk rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemangku kebijakan, yakni pemerintah daerah.

2. METODE

Kegiatan ini diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan Musrenbang Anak Kabupaten Lombok Tengah. Penyelenggara kegiatan ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan dan Riset Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Lombok Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 hari mulai tanggal 15-16 Februari 2025 di Ballroom Kantor Bupati Lombok Tengah. Kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan anak dari setiap kecamatan, forum anak NTB, organisasi perangkat daerah terkait, lembaga swadaya masyarakat, dan kalangan akademisi. Dalam pelaksanaannya, peserta dibagi menjadi 8 kelompok yang masing-masing kelompok terdiri dari 9-10 orang anak. Setiap kelompok didampingi oleh 2 orang fasilitator untuk membahas topik yang berbeda-beda, mulai dari isu perkawinan anak, pemanfaatan teknologi informasi secara sehat, serta fasilitasi pengembangan potensi dan kreatifitas anak. Fasilitator bertugas membangun kesepahaman dengan anak tentang tujuan kegiatan, prosedur kegiatan, serta tanggung jawab anak. Dalam proses fasilitasi, fasilitator tidak diperkenankan untuk mengarahkan atau menilai aspirasi anak. Sebelum eksplorasi suara anak dilakukan, peserta mendengarkan penyajian materi dari Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB dan ketua Forum Anak NTB. Setelah kegiatan diskusi selesai, setiap kelompok menyepakati minimal 3 poin suara anak yang akan dibawa ke sidang suara anak. Sidang suara anak ini kemudian menghasilkan pokok-pokok aspirasi anak yang akan menjadi pertimbangan bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dalam merumuskan kebijakan yang terkait dengan pemenuhan hak-hak anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan dimulai dengan pemaparan tentang strategi dan arah kebijakan pemenuhan hak anak di Provinsi NTB. Paparan disajikan oleh Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB. Dalam paparannya, Kepala DP3AP2KB menyatakan bahwa isu kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini merupakan dua isu yang menjadi perhatian utama pemerintah. Hal ini disebabkan karena angka kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini di NTB masih tinggi. Paparan selanjutnya disajikan oleh Ketua Forum Anak NTB. Dalam paparannya, ketua forum anak menjelaskan pentingnya mendengarkan suara anak dalam pengambilan Keputusan oleh pemerintah. Dalam hal ini, anak bertanggung jawab untuk mengungkapkan aspirasinya sehingga bisa didengarkan oleh para pengambil kebijakan. Oleh sebab itu, agenda musrenbang anak perlu dilakukan sehingga pihak-pihak terkait bisa mengeksplorasi dan mengakomodasi suara anak.



Gambar 1. Pembukaan dan suasana diskusi perumusan suara anak Lombok Tengah

Pada sesi diskusi kelompok, setiap kelompok didampingi oleh 2 orang fasilitator yang bertugas memastikan jalannya diskusi berlangsung dengan egaliter dan inklusif. Sebelum diskusi kelompok dimulai, fasilitator menjelaskan bahwa setiap peserta memiliki hak untuk bersuara dan tidak boleh ada peserta lain yang memberikan respon apa pun sebelum yang bersangkutan selesai menyatakan aspirasi atau pendapatnya. Untuk memudahkan diskusi, fasilitator mengajukan beberapa pertanyaan pemandu yang jawabannya dituliskan oleh setiap peserta di sticky note.

Setelah membaca pertanyaan pemandu, salah seorang peserta bertanya tentang makna istilah “fasilitasi”. Peserta kemudian menjelaskan bahwa fasilitasi artinya proses untuk memudahkan dan membantu pemenuhan kebutuhan orang lain. Setelah itu, setiap peserta menuliskan jawaban terhadap pertanyaan panduan yang kemudian ditempelkan di kertas plano yang telah disediakan. Setelah semua peserta menuliskan jawaban terhadap pertanyaan panduan, fasilitator kemudian mengajak peserta untuk mengelompokkan setiap jawaban. Setiap kelompok jawaban kemudian dianalisis sehingga ditemukan keterkaitannya satu dengan yang lain. Setelah itu, peserta menyetujui rumusan suara anak yang akan dibawa ke sidang anak Lombok Tengah.

Dari sidang suara anak, disepakati 18 rumusan suara anak seperti yang terlihat di gambar di bawah ini. Sebagian besar suara anak berkaitan dengan penguatan kualitas sumber daya yang dibutuhkan untuk mendukung keterpenuhan hak-hak anak seperti regulasi yang mengatur optimalisasi layanan bagi anak. Selain itu, mereka mengharapkan peningkatan kualitas fasilitas olahraga dan sekolah untuk menunjang pengembangan potensi dan kreatifitas. Selebihnya, anak Lombok Tengah mengharapkan jalinan komunikasi yang lebih intens antara orang tua, Masyarakat, dan pemerintah dengan anak dalam rangka mengenali dan memahami kebutuhan anak.

NO.	HASIL SIDANG SUARA ANAK
1	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PENGUTARAAN DELEGASI FORUM ANAK DI SETIAP DESA PADA WILAYAH DI LOMBOK TENGAH UNTUK MEMANTAU DAN MELALUHKAN KEINGINAN ANAK DARI BERESKAH KEMUNGKINAN YANG TIDAK BENDUNGAN
2	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PEMBUATAN REGULASI DESA SETU DESA TERKESIP DENGAN PERKEMBANGAN ANAK
3	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PENGADATAN UU ITE SEBUT DISERTAKANNYA HUKUMAN TERHADAP PELANGGIRAN UNGGAS-UNGGAS TERKAIT
4	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH BERTYA SOSIALISASI DAN KOLABORASI TENTANG POLA ASUH ORANG TUA TERHADAP ANAK
5	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH ADANYA APLIKASI PENCERAMBA SAHABAT DAN BUDAYA BUNU BUNDA
6	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH KONTRIBUSI UNTUK MENDORONG BERKEMBANG ANAK FUTUR SEKOLAH AGAR MELALUHTAN PENDIDIKAN
7	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PEMADATAN BAHAN KONSELING SEMAJA DI SETIAP DESA
8	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MEMERIKSA RUMAH PERLINDUNGAN SOSIAL ANAK DI TINGKAT KEDAMATAN
9	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PERPUSTERAN URUM SETAP DESA DENGAN KOLEKSI BUKU YANG SESUAI DENGAN KARAKTERISTIK ANAK
10	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH AGAR TIDAK MENJUAL BOKOR DAN MINUMAN KERAS KEPADA ANAK-ANAK DAN MEMERIKSA KEADAAN TERBESAR BERKAITAN DENGAN KEMUNDURAN MINUMAN KERAS DAN BOKOR
11	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH FASILITAS BERHA FASILITAS OLAHRAGA AGAR LAYAK UNTUK DINYAKAN
12	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PEMBERATAN PENGESAHAN TERHADAP PENYELISIHAN NARKOBA
13	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PENINGKATAN PENCIDRAN TERHADAP PERKEMBANGAN ANAK
14	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH PENDIDIKAN YANG LAYAK DAN BAH TIDAK LEBI DI PEKERJAAN
15	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH TRANSPORTASI LEMBAH UNTUK KE SEKOLAH
16	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH ADANYA SOLUSI TENTANG PENYALAHAN ANAK DESERTAF DESA TERUTAMA ANAK PENYANDANG DISABILITAS
17	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH BERTYA PENGADATAN BAHAN SENTIAR KEDUA KELASKA KUDANG MAMPU
18	KAMI ANAK LOMBOK TENGAH MENGINNKAH BERTYA KEGIATAN POSITIF UNTUK MELALUHKAN HINAT DAN BAKAT DALAM BIDANG PENDIDIKAN

Gambar 2. Rumusan suara anak Kabupaten Lombok Tengah

4. KESIMPULAN

Kegiatan eksplorasi suara anak menghasilkan beberapa kesimpulan, yaitu:

- a. Munculnya kesadaran anak akan tanggung jawab mereka terhadap beserta dampak pengambilan keputusan oleh pemerintah. Hal ini terlihat dari respon mereka di dalam diskusi.
- b. Akomodasi suara anak memungkinkan perumusan kebijakan yang relevan dengan permasalahan aktual yang terjadi. Hal ini tentunya menjadi cara untuk menghindari munculnya kebijakan-kebijakan yang tidak memecahkan masalah.
- c. Proses akomodasi suara anak perlu dilakukan dengan memberikan ruang ekspresi yang luas namun tetap terkontrol. Hal ini bisa dilakukan dengan memfasilitasi anak untuk memahami masalah beserta akar penyebabnya. Dalam hal ini, orang tua diharapkan lebih banyak memainkan peran sebagai “penjaga pagar” yang bertugas memastikan ekspresi suara anak tidak berbenturan dengan norma dan tertuju pada penyelesaian masalah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah melalui BAPPERIDA yang telah memberi dukungan terhadap kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Christidou, V. (2011). Interest, Attitudes and Images Related to Science: Combining Students' Voices with the Voices of School Science, Teachers, and Popular Science. *International Journal of Environmental and Science Education*, 6(2), 141–159.
- Conner, J., Posner, M., & Nsowaa, B. (2022). The relationship between student voice and student engagement in urban high schools. *The Urban Review*, 54(5), 755–774.
- Flores, O. J., & Ahn, J. (2024). “Kids Have Taught Me. I Listen to Them”: Principals Legitimizing Student Voice in Their Leadership. *AERA Open*, 10(1), 1–14. <https://doi.org/10.1177/23328584241232596>
- Geurts, E. M., Reijs, R. P., Leenders, H. H., Jansen, M. W., & Hoebe, C. J. (2024). Co-creation and decision-making with students about teaching and learning: A systematic literature review. *Journal of Educational Change*, 25(1), 103–125.
- Jones, M. A., & Bubb, S. (2021). Student voice to improve schools: Perspectives from students, teachers and leaders in ‘perfect’ conditions. *Improving Schools*, 24(3), 233–244.
- Kahne, J., Bowyer, B., Marshall, J., & Hodgins, E. (2022). Is responsiveness to student voice related to academic outcomes? Strengthening the rationale for student voice in school reform. *American Journal of Education*, 128(3), 389–415.
- Rakhshanda, N., Kazi, A. S., Shabana, M., & Uzma, Q. (2020). Institutional facilitation for learning improvement with consideration of students' voices. *World Journal on Educational Technology: Current Issues*, 12(4), 389–400.
- Rudduck, J., & Fielding, M. (2006). Student voice and the perils of popularity. *Educational Review*, 58(2), 219–231.
- Sandoval, M., & Messiou, K. (2022). Students as researchers for promoting school improvement and inclusion: a review of studies. *International Journal of Inclusive Education*, 26(8), 780–795.